



RENCANA KERJA

(R E N J A)

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS TENAGA KERJA
JL. LETJEND S.PARMAN NO.17 , TELP.(0281) 891187, FAX : (0281) 894861
PURBALINGGA 53316**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun setiap tahun. Rencana Kerja (Renja) Dinas memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya Renja ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Purbalingga, Juni 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga



Ir. GUNARTO
Pembina Utama Muda
Nip. 195909221988031004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	6
BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN	
KEGIATAN.....	18
3.1. Isu Strategis	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Tahun 2019.....	18
3.3. Arah Kebijakan Tahun 2019	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2019.....	23
4.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019	23
4.1.1. Pendanaan OPD	24
4.2. Matrik Renja OPD Tahun 2019 (RKT 2019)	24
BAB V PENUTUP.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arah kebijakan pembangunan Purbalingga ditujukan untuk mewujudkan Visi Purbalingga yang merupakan visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA’**, dengan prioritas pembangunan penciptaan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai prinsip-prinsip good governance antara lain, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki visi strategis, serta penegakkan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan yaitu :

- a). Pembangunan kualitas manusia
- b). Pembangunan pedesaan
- c). Pembangunan ekonomi kerakyatan
- d). Penyediaan infrastruktur yang memadai

Untuk menunjang agenda pokok pembangunan tersebut harus didukung dengan penghasilan masyarakat yang memadai. Penghasilan masyarakat yang memadai akan terwujud apabila terdapat lapangan usaha yang cukup serta suasana kehidupan yang nyaman dan sehat.

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga berjumlah 907.507 jiwa yang terdiri dari laki laki 448.419 jiwa dan perempuan 459.088 jiwa (Purbalingga Dalam Angka 2017). Jumlah penduduk yang besar dapat dijadikan sebagai kekuatan dan modal pembangunan. Oleh karena itu usaha peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lainnya perlu dilakukan secara teliti dan terintegrasi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu Jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian kabupaten Purbalingga yang pada tahun 2015 cukup besar yaitu 68,05 (BPS kabupaten Purbalingga Tahun 2017).

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka yang merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja di kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 4,84 % dan tahun 2016 sebesar 5,33 % (Data BPS Purbalingga).

Permasalahan yang cukup menonjol terkait dengan tingginya angka pengangguran adalah kualitas dan produktifitas tenaga kerja masih rendah, sehingga kesempatan kerja yang tersedia tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu perlu peningkatan mutu dan produktifitas bagi tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing dalam memasuki lapangan kerja atau bertransmigrasi.

Dengan demikian atas dasar permasalahan tersebut perlu disusun kebijakan program dan kegiatan yang secara bertahap dan berkesinambungan mampu mendorong secara efektif berkembangnya dunia usaha. Dan secara bersamaan pula mampu menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi jumlah masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan serta mendorong terwujudnya pemerataan pendapatan. Hal ini sejalan dengan misi kabupaten Purbalingga yang ke 5 adalah **“Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.”**

1.2 . LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinnaker Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional / SSPN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
14. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DINNAKER adalah :

1. Sebagai pedoman para pelaksana pembangunan ataupun lembaga dan stakeholder yang lain;
2. Alat pengendali dan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif dan efisien.

Adapun Tujuannya adalah :

- a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga ataupun stakeholder yang lain;
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan ;
- d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja OPD
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Berisi indikator beserta data capaian kinerja OPD

III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019
- 3.2. Sasaran Tahun 2019
- 3.3. Arah Kebijakan Tahun 2019

- IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2019
 - 4.1. Program dan kegiatan Pembangunan Tahun 2019
 - 4.2. Pendanaan OPD
 - 4.3. Matrik Renja OPD Tahun 2019
- V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Tenaga Kerja tahun 2017 akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.

a. Capaian Kinerja Masing-masing Sasaran

a.1. Capaian Kinerja Sasaran ke 1

Capaian kinerja berdasarkan sasaran yang pertama yakni meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial dilihat dari Indeks Kinerja Utama OPD meliputi :

1. Cakupan pencari kerja yang ditempatkan, dari target kinerja 40% yang harus tercapai pada tahun 2017, realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 41,4 % meningkat dari tahun yang lalu 41,2%. Dari data pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga sebanyak 13.789 orang sedangkan yang ditempatkan sebanyak 5.711 orang berdasarkan data di Dinas Tenaga Kerja. Tidak tersedianya data pencari kerja yang telah bekerja yang melapor ke Dinas Tenaga Kerja sehingga menjadi tidak optimal dan menyulitkan dalam perhitungan capaian kinerja.
2. Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja dari target kinerja 2% yang harus tercapai pada tahun 2017, realisasi kinerja pada tahun 2017 melampaui target sebesar 4,5. Dibandingkan dengan tahun lalu maka meningkat dari capaian tahun lalu sebesar 1,91%. Dari data pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga sebanyak 13.789 orang yang mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan sebanyak 614 orang. Tidak semua peminat dapat mengikuti pelatihan karena terkendala terbatasnya anggaran.
3. Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama dari target 90% yang harus tercapai

pada tahun 2017, realisasi kinerja pada tahun 2017 melampaui target sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun lalu meningkat dari capaian tahun lalu sebesar 77,78%. Dari sejumlah 2 kasus perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama telah diselesaikan dengan baik sejumlah 2 kasus, hal ini didukung dengan pembinaan yang secara rutin dilakukan pada perusahaan-perusahaan sehingga bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus dilakukan dengan kekerasan ataupun demo.

4. Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial dari target kinerja 77% yang harus tercapai pada tahun 2017, realisasi kinerja pada tahun 2017 melampaui target sebesar 81,0%. Dibandingkan tahun lalu maka meningkat dari capaian tahun lalu sebesar 80,18%. Sosialisasi dan pembinaan serta Bimtek tentang ketenagakerjaan yang secara rutin dilakukan ke perusahaan-perusahaan sehingga dari tenaga kerja yang terdata di perusahaan sebanyak 52896 telah mengikuti jaminan sosial BPJS sebanyak 42827.
5. Rasio UMK terhadap upah di atas UMK dari target kinerja sebesar 85% yang harus dicapai pada tahun 2017, realisasi kinerja pada tahun 2017 melampaui target sebesar 93,5%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu meningkat dari capaian tahun lalu sebesar 89,85%. Kegiatan berupa Survey ke 3 pasar besar yakni Pasar Segamas, Pasar Bobotsari dan Pasar Bukateja, Sosialisasi UMK dan Struktur Skala Upah, Pemantauan UMK dan THR di perusahaan-perusahaan, di temukan dari sebanyak 45.258 orang tenaga kerja maka sebanyak 42.298 telah mendapatkan pembayaran penghasilan sesuai UMK.

Capaian kinerja sasaran tersebut selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Sasaran 1
Meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017 (%)	Realisasi (%) Tahun 2017	% Capaian 2017	% Capaian Tahun 2016
1	2	3	4	5	6
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial : 	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pencari kerja yang ditempatkan. 	40%	41,4%	103%	41,24%
	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan 	2 %	4,5%	225%	1,91%
	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui penyelesaian bersama. 	90 %	100%	111%	77%
	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial 	77%	81,0%	105%	80,18%
	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio UMK terhadap upah diatas UMK 	85%	93,5%	110%	89,85%
	Rata – rata Capaian Sasaran 1				130,8%

Dari tabel tersebut dapat dilihat rata-rata capaian sasaran 1 meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial adalah sebesar 130,8% atau sangat baik.

Dibandingkan dengan tahun 2016 maka capaian indikator kinerja per IKU juga **meningkat**.

Hambatan atau kendala dalam pencapaian sasaran tersebut adalah kurangnya data penempatan kerja karena dari pencari kerja banyak yang tidak melapor setelah mendapatkan pekerjaan. **Solusi** untuk itu dilakukan melalui pendataan pada tiap perusahaan yang ada di Purbalingga dan pada pencari kerja itu sendiri. **Hambatan atau kendala yang lain** adalah kurangnya dukungan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pada kelancaran pelaksanaan pelatihan di BLK. **Solusi** yang dilakukan adalah mengusulkan anggaran untuk sarana dan prasara pelatihan di BLK.

Sasaran 1 tersebut didukung pencapaiannya melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

(I) Program Pembinaan Peningkatan Ketrampilan dan penempatan Tenaga

Kerja :

- 1. Bursa Kerja** yang semula di awal anggaran untuk pameran bursa kerja dan sosialisasi ke BKK maka dialihkan untuk pembuatan **sistem online untuk informasi lowongan kerja dan data ketenagakerjaan** dengan nama **Hello Work** yang merupakan **inovasi baru** pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, alokasi dana Rp. 31.567.000,- Realisasi Rp 30.000.000,- (95,04 %), sisa anggaran untuk efisiensi.
- 2. Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja AKAD**, target 100 orang dengan alokasi dana Rp. 36.450.000,- Realisasi Rp. 32.070.900,- (87,99 %), ada sisa anggaran sebesar Rp.4.379.100,-, sisa anggaran untuk efisiensi.
- 3. Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja AKAN**, target 100 orang dengan alokasi dana Rp. 20.591.000,- Realisasi , Rp. 20.591.000,- (100,00 %). Kegiatan berupa pemberian

rekomendasi pembuatan pasport bagi TKI maupun TKW yang akan bekerja ke luar negeri dan melakukan wawancara untuk memvalidasi data serta menyediakan aplikasi TKI Online. Jumlah TKI yang melakukan pembuatan pasport ada 159 orang.

Pemberangkatan TKI bukan dari Dinas tapi dari Perusahaan TKI, yang menjadi kendala adalah tidak ada laporan peserta yang berangkat dari pihak perusahaan.

- 4. Pengelolaan BLK;** Terpeliharanya dan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor guna menunjang kelancaran operasional BLK, Alokasi dana Rp. 476.000.000,- Realisasi Rp 459.802.919,- (96,6 %).Sisa anggaran dari Belanja Listrik, Air, Telephon karena ada efisiensi pemakaian.
- 5. Pelatihan Bagi Calon Tenaga Kerja (DBH-CHT).** dapat dilatih 20 Orang ketrampilan otomotif, 20 orang Pelatihan Kewirausahaan dan pelatihan produktifitas lainnya 40 orang. Alokasi dana Rp.75.000.000,- Realisasi Rp.74.838.00000,- (99,78 %). Yang menjadi kendali banyak peminat tetapi anggaran kurang.
- 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBH-CHT).** Terpenuhinya sarana dan prasarana BLK dengan alokasi dana Rp. 123.970.000,-, Realisasi Rp.123.970.000,- (100%). Hal ini untuk mendukung juga pada penyelenggaraan pelatihan dari pusat sebanyak 240 peserta pelatihan.
- 7. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Pabrik** dengan sasaran 200 pekerja. / 2 perusahaan, dengan pemeriksaan kesehatan meliputi : test paru-paru, urine, mata dan kelelahan fisik yang dilakukan oleh Hiperkes. . Alokasi Dana Rp 62.871.000,-. Realisasi Rp 62.265.500,- (100,00 %).
- 8. Penyelenggaraan Pelatihan di BLK (DBH-CHT),** Dalam rangka pemerataan kesempatan kerja mempersiapkan tenaga mandiri, BLK telah menyelenggarakan pelatihan ketrampilan yang ditujukan kepada para masyarakat purbalingga. Adapun alokasi Anggaran Rp 410.436.000,- dengan Jenis-jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yakni

pelatihan Otomotif, menjaahit, las, tataboga dan TIK dengan Realisasi sebesar Rp. 407.969.853,- (99,04%) sisa anggaran untuk efisiensi.

9. Penyusunan DED Pengembangan Balai Latihan Kerja

Dalam rangka mempersiapkan pembangunan gedung di BLK yang bertujuan untuk pengembangan BLK maka dilakukan penyusunan DED dengan anggaran Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 49.184.900,- (98,37%).

(II). Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial

- 1. Fasilitasi Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL),** kegiatan berupa Survey ke 3 pasar besar yakni Pasar Segamas, Pasar Bobotsari dan Pasar Bukateja, Sosialisasi UMK dan Struktur Skala Upah, Pemantauan UMK dan THR di perusahaan, Alokasi dana Rp., 40.000.000,- Realisasi Rp. 38.688.000,- (96,72 %). Sisa anggaran untuk efisiensi.
- 2. Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja** Sasaran 80 orang telah mengikuti pelatihan Mebelair, Jahit, Las, Handycraft (masing-masing 16 orang) Alokasi dana Rp 69.500.000,-. Realisasi Rp 69.115.850,-.(99,45%).
- 3. Sosialisai Keselamatan dan Kesehatan Kerja/ K-3** bertujuan agar tenaga kerja bertambah pengetahuannya tentang K3 (kepesertaan BPJS) dan menghimbau kepada tiap perusahaan untuk memasang spanduk yang berkaitan dengan Bulan K3 serta pengerahan tenaga kerja sebagai peserta upacara Bulan K3 sebanyak 100 orang. Alokasi dana Rp. 7.540.000,- Realisasinya Rp. 7.259.500,- (96,28%).
- 4. Fasilitasi Penguatan Hubungan Industrial.** Untuk terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara unsur TRIPARTIT (Pemerintah, Apindo dan Pekerja/Perusahaan perlu diperdayakan Sarana Hubungan Industrial berupa

5. Bimtek, Rakor, Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Pemantauan UMK dan THR. Adapun alokasi Dana Rp 105.954.000 dan Realisasi Rp 104.350.000,- (98,49 %) . Sisa anggaran untuk efisiensi. Kendala dalam pelaksanaan waktu harus menyesuaikan dengan perusahaan, dan SDM yang mewakili dari perusahaan seringkali berganti.
6. Monitoring pelaksanaan penempatan AKAD untuk memantau dan memastikan tenaga kerja mendapatkan kesejahteraan sesuai ketentuan dengan meninjau lokasi. Penempatan pada tahun 2017 yang paling banyak di Kalimantan barat, tengah dan timur. Jumlah yang ditempatkan 46 orang. Dari Dinas hanya monitoring saja karena anggaran terbatas. Realisasi kegiatan 100%. Untuk urusan perekrutan, seleksi sampai dengan pembekalan dilakukan oleh perusahaan. Adapun alokasi dana sebesar Rp. 17.155.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 16.974.875,- (98,95%).
7. Peringatan Hari Buruh Internasional, pelaksanaan meliputi lomba-lomba dan sarasehan dengan Pak Bupati, diambil dari serikat pekerja dan perwakilan perusahaan masing-masing, dari Dinas hanya sebagai penyelenggara.
Kegiatan lomba : masak, administrasi kinerja serikat pekerja, Kakang Mbekayu perusahaan, administrasi pemberdayaan LKS Bipartit, Peserta lomba masak ada 72 orang, perwakilan perusahaan dan dari pengusaha sendiri, perwakilan pekerja biasanya 2 orang. Peserta lomba administrasi LKS Bipartit undangan 63 perusahaan tapi peserta 10. Peserta lomba SP ada 43 perusahaan.
Peserta lomba Kakang Mbekayu ada 35 perusahaan ada 35 pasang Kakang Mbekayu. Sarasehan mengundang 500 perusahaan yang datang lebih banyak undangan hampir mencapai 700 an orang. Tidak ada kendala yang berpengaruh besar, hanya kurang akomodasi (kursi) dan konsumsi yang belum mencukupi. Dari dana sebesar Rp. 55.467.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 53.764.000,- (96,93%).

a.2. Capaian Kinerja Sasaran ke 2

Capaian kinerja sasaran ke 2 meningkatnya pelayanan transmigrasi maka Jumlah calon transmigran yang difasilitasi dari target kinerja sebesar 5 KK yang harus tercapai pada tahun 2017, namun karena Quota dari Pusat hanya 4 KK sementara yang telah mendaftar tiba-tiba mengundurkan diri menjelang keberangkatan sehingga target tidak tercapai atau 0%.

Tabel Sasaran 2
Meningkatnya Pelayanan Transmigrasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017 (%)	Realisasi (%) Tahun 2017	% Capaian 2017	% Capaian Tahun 2016
1	2	3	4	5	6
• Meningkatkan pelayanan transmigrasi	Persentase Jumlah transmigran yang difasilitasi	100%	0%	0%	66%
	Rata-rata capaian Sasaran 2			0%	

Dari tabel tersebut dapat dilihat rata-rata capaian sasaran 2 meningkatnya pelayanan transmigrasi adalah sebesar 0% atau sangat rendah. Dibandingkan dengan tahun 2016 maka capaian indikator kinerja utama menurun. **Hambatan atau kendala** dalam pencapaian sasaran tersebut adalah pertama terbatasnya kuota atau jatah untuk calon transmigran yang diberikan oleh pusat, sementara animo masyarakat cukup besar, yang kedua tidak tersosialisasinya lokasi transmigran dari Pusat dengan baik sehingga setelah dilakukan pembekalan dan cek lokasi ternyata tidak cocok daerah yang akan dijadikan untuk bercocok tanam dan pendaftar calon transmigran mengundurkan diri sebagai calon transmigran. **Solusi** untuk itu dilakukan melalui koordinasi dengan instansi vertikal dan Pusat.

Sasaran 2 tersebut didukung pencapaiannya melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Penyiapan dan fasilitasi Transmigrasi:

a. Fasilitasi Pemindahan Transmigrasi dilaksanakan terhadap 5 KK yang mendaftar transmigrasi sudah dilaksanakan pembekalan dan pelatihan, persiapan sudah matang. Rencana target 15 KK namun kuota dari Pemerintah Pusat hanya 4 KK dengan lahan 1,75 hektar per KK. Anggaran Rp. 154.952.000,- Realisasi sebesar Rp. 86.062.400 (44,46%). Transmigrasi belum tercapai karena peserta mengundurkan diri sebelum pemberangkatan dengan alasan tidak siap untuk ditempatkan di daerah Sulawesi tenggara. Permasalahan Quota/jatah transmigran dari Pemerintah Pusat tidak banyak (tidak memenuhi target RPJMD). Solusi atau upaya yang dilakukan antara lain koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI lebih diintensifkan.

b. Sosialisasi Transmigrasi tidak dilaksanakan dan dialihkan pendanaannya untuk kegiatan yang lain.

Disamping itu guna mendukung secara umum operasional kegiatan keseluruhan dibantu melalui Program sbb :

(IV). Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.

- 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi**, melayani 32 PNS Alokasi dana Rp. 120.000.000,- Realisasi Rp. 119.958.143,- (99,97%).
- 2. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran**, Jumlah kebutuhan kegiatan administrasi perkantoran yang dapat dilayani. Alokasi dana Rp.248.910.000,- Realisasi Rp 228.633.113,- (91,85 %) Ada sisa anggaran untuk efisiensi.
- 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor**, terpeliharanya sarana dan prasarana kantor seperti : kendaraan roda empat 6 unit,roda dua 28 unit, komputer, AC dan lainnya. Alokasi dana Rp. 209.399.000,- Realisasi Rp. 200.818.200,- (95,90 %). Ada sisa anggaran untuk efisiensi.
- 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor**, dapat memenuhi peralatan kantor antara lain, Almari, laptop, PC

computer, unit printer. Alokasi dana Rp.237.900.000,- Realisasi Rp. 237.885.000,- (99,99 %).

5. **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai,** Meningkatkan kemampuan SDM PNS tugas-tugas yang diemban akan berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tupoksinya. Alokasi dana Rp.8.000.000,- Realisasi Rp. 4.590.000,- (57,38%).
6. **Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD.** Pemenuhan laporan (menyusun Renja, Renstra, LKPJ) dapat dilaksanakan sebagai bukti kerja. Alokasi Dana Rp 11.850.000,- Realisasi Rp 9.674.000,- (81,64 %).

b. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan secara umum baik, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi anggaran (belanja langsung dan tidak langsung) sebesar Rp 5.395.881.000,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Purbalingga. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2017 terealisasi sebesar Rp. 5.167.698.586,- (95,77%). Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja Dinas Tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Anggaran dan Realisasi

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

1	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN			
		PAGU	REALISASI	SISA	%
		Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6
	BELANJA	5.395.881.000	5.167.698.586	228.182.414	95,77
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.822.369.000	2.746.405.233	75.963.767	97,30
II	BELANJA LANGSUNG	2.573.512.000	2.421.293.353	152.218.647	94,09
A.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	836.059.000	801.558.456	34.500.544	95,87
01	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	248.910.000	228.633.113	20.276.887	91,85
02	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	120.000.000	119.958.143	41.857	99,97
03	Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor	209.399.000	200.818.200	8.580.800	95,90
04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	237.900.000	237.885.000	15.000	99,99
05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	8.000.000	4.590.000	3.410.000	57,38
06	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	11.850.000	9.674.000	2.176.000	81,64
B.	Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja	1.286.885.000	1.260.693.072	26.191.928	97,96
01	Bursa Kerja	31.567.000	30.000.000	1.567.000	95,04
02	Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja AKAD	36.450.000	32.070.900	4.379.100	87,99
03	Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja AKAN	20.591.000	20.591.000	-	100,00
04	Pelatihan Bagi Calon Tenaga Kerja (DBH-CHT)	75.000.000	74.838.000	162.000	99,78
05	Pengelolaan Balai Latihan Kerja	476.000.000	459.802.919	16.197.081	96,60
06	Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Pabrik	62.871.000	62.265.500	605.500	100,00
07	Penyelenggaraan Pelatihan di BLK (DBH-CHT)	410.436.000	407.969.853	2.466.147	99,04
08	Pengadaan Sarana dan Prasarana BLK	123.970.000	123.970.000	-	100,00
09	Penyusunan DED Pengembangan Balai Latihan Kerja	50.000.000	49.184.900	815.100	98,37

C.	Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	295.616.000	290.152.225	5.463.775	98,15
01	Fasilitasi Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak	40.000.000	38.688.000	1.312.000	96,72
02	Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja	69.500.000	69.115.850	384.150	99,45
03	Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja / K3	7.540.000	7.259.500	280.500	96,28
04	Fasilitasi Penguatan Hubungan Industrial	105.954.000	104.350.000	1.604.000	98,49
05	Monitoring Pelaksanaan Penempatan AKAD	17.155.000	16.974.875	180.125	98,95
06	Peringatan Hari Buruh Internasional	55.467.000	53.764.000	1.703.000	96,93
D.	Program Penyiapan dan fasilitasi Transmigran	154.952.000	68.889.600	86.062.400	44,46
01	Fasilitasi Pemindahan Transmigrasi	154.952.000	68.889.600	86.062.400	44,46
02	Sosialisasi Ketransmigrasian	-	-		

Secara khusus anggaran per Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis Efisiensi per Sasaran Tahun 2017

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	% ANGGARAN	% CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.Meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial	1.582.501.000	1.550.845.297	98%	130,8%	Efisien
2.Meningkatnya pelayanan transmigrasi	154.952.000	68.889.600	44%	0%	Tidak efisien, disebabkan calon transmigran mengundurkan diri.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk sasaran 1 adalah efisien dengan realisasi anggaran sebesar 98 % capaian kinerja sebesar 130,8 % sehingga persentase lebih tinggi untuk capaian kinerja yakni sebesar 32,8 %.

Sedangkan untuk sasaran 2 adalah tidak efisien dengan realisasi anggaran 44% sedangkan capaian kinerja sebesar 0%. Sasaran 2 tidak tercapai karena calon transmigran ternyata mengundurkan diri sebelum pemberangkatan ke daerah transmigran disebabkan adanya ketidak cocokkan dengan lokasi transmigran sementara penentuan lokasi dan jatah atau kuota ditentukan oleh Pusat, sehingga sasaran 2 belum dapat tercapai dengan baik.

BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Isu Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Purbalingga maka dirumuskan dalam rencana program dan kegiatan yang mengacu pada permasalahan yang ada. Permasalahan atau Isu Strategis Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja.
2. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami masyarakat
3. Tingginya angka pencari kerja terdaftar karena terbatasnya lowongan kerja dan lowongan tidak sesuai dengan pasar kerja
4. Pemahaman program pemagangan masih terbatas belum sesuai dengan ketentuan/pedoman
5. Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial;
6. Masih kurangnya perlindungan hak normatif pekerja di sektor formal maupun informal .

3.2. Tujuan dan Sasaran Tahun 2019

Berdasarkan pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**. Guna mencapai visi tersebut, dilaksanakan melalui tujuh Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016-2021 yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayahan yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari pernyataan misi tersebut, dapat disimpulkan misi yang berkaitan dimana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu pada Misi ke 5 yaitu **Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja**”.

Tujuan jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga yang ingin dicapai dari Misi ke-5 **adalah meningkatnya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat.**

Sejalan dengan tujuan RPJMD tersebut maka **Tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja** sesuai tugas dan tupoksinya adalah **Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan profesional.**

Untuk mencapai tujuan tersebut melalui Visi dan Misi sbb :

➤ **VISI**

Terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan profesional

➤ **MISI**

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan perluasan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja.
2. Meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis dan terlindungi jaminan sosial.

3. Meningkatnya pelayanan transmigrasi.

Sebagaimana dikemukakan di atas Tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja adalah Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan profesional, maka **sasaran adalah Meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial**

Adapun Indikator Tujuan OPD adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Target Tingkat Pengangguran Terbuka yang akan dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar < 5%.

Indikator Sasaran dan target yang akan dicapai tahun 2019 yang merupakan Indeks Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Cakupan pencari kerja yang ditempatkan, target 44 %
2. Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial, target 83%
3. Rasio tenaga kerja mendapat upah sesuai UMK, target 92%

Sedangkan sasaran kegiatan tahun 2019 antara lain adalah :

1. Meningkatnya ketrampilan bagi peserta pelatihan sebanyak 272 orang;
2. Mengoptimalkan keberadaan BLK berupa penyelenggaraan pelatihan-pelatihan, pengadaan sarana dan prasarana BLK dan Pembangunan Gedung Kantor yang permanen, Aula, Asrama dan tempat ibadah, kantin, renovasi workshop tata boga dll;
3. Memfasilitasi penempatan TK AKAD dan AKAH sebanyak 100 orang;
4. Memfasilitasi pertemuan antara pengguna tenaga kerja sebanyak 25 perusahaan dengan pencari kerja melalui Bursa Kerja yang akan dilaksanakan sekali dalam setahun;
5. Menyediakan data informasi ketenagakerjaan dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
6. Fasilitasi penguatan kelembagaan industrial perusahaan melalui pembinaan 60 perusahaan
- 7 Fasilitasi masyarakat transmigrasi dengan menempatkan masyarakat melalui program transmigrasi sebanyak 3 KK.

3.3. Arah Kebijakan Tahun 2019

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang di tempuh adalah :

a. **Peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja :**

1. Mengoptimalkan pelatihan kerja :

a. Berbasis kebutuhan masyarakat

- Pelatihan pengolahan makanan, konveksi/garmen, potong rambut, rias manten, kerajinan, kapster salon dan lainnya.

b. Berbasis kompetensi

- Pelatihan klasikal yang berdasarkan pada kurikulum dan silabus yang telah ditentukan dengan Instruktur yang memiliki kompetensi di bidang kejuruan masing-masing seperti LAS SMAW 3G, Otomotif roda 2, Garmen Apparel, Tata Boga, TIK dan lainnya.

c. Program pemagangan ke luar negeri

- Pemagangan yang diminati saat ini adalah pemagangan ke Jepang baik di sektor pertanian, keperawatan dan IKM. Melalui 2 jalur yakni :
 - a. Program IMM (Rekrutmen melalui pemerintah);
 - b. Sending Organization (SO), melalui LPKS yang telah mendapatkan ijin dari Kemnaker RI.

2. Mengoptimalkan penempatan kerja

a. AKAL/Antar Kerja Antar Lokal untuk Purbalingga dan area Jawa Tengah;

b. AKAD/Antar Kerja Antar Daerah untuk lintas Provinsi ; pabrik tekstil, pabrik elektronik (Batam), Perkebunan Sawit (Kalimantan) dan lainnya;

c. AKAN/Antar Kerja Antar Negara untuk lintas negara (Jepang, Korea, Taiwan dan lainnya).

d. Inovasi melalui pembuatan aplikasi **Hello Work Purbalingga** yang memuat informasi tentang ketenagakerjaan dan lowongan kerja /pasar kerja yang dapat diakses secara online oleh seluruh masyarakat.

e. Penciptaan lapangan kerja melalui pekerjaan umum

- f. Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya untuk mengurangi pengangguran kurang terdidik.
- g. Mendorong pekerja sebanyak mungkin untuk melaksanakan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.

b. Mengembangkan hubungan industrial yang harmonis

- Pembinaan ke perusahaan-perusahaan terkait ketenagakerjaan

c. Peningkatan rekrutmen dan pelatihan calon transmigran

- Sosialisasi transmigrasi ke desa-desa dan fasilitasi calon transmigran yang akan diberangkatkan ke lokasi daerah transmigrasi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2019

4.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019

Untuk merealisasikan visi dan misi serta kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun program dan kegiatan.

a. Program

Program pembangunan khususnya yang ditujukan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah :

1. Program pembinaan, peningkatan ketrampilan dan penempatan Tenaga Kerja
2. Program peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan hubungan industrial.
3. Program Ketransmigrasian

Sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah diperlukan penguatan kelembagaan daerah berupa :

1. Program penguatan kelembagaan daerah.

Adapun kegiatannya adalah :

- Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja
 1. Pelatihan Berbasis Kompetensi
 2. Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja
 3. Fasilitasi Kelembagaan Pelatihan Kerja Swasta
 4. Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja
 5. Pengelolaan dan Pemeliharaan BLK
 6. Penyediaan Sarana dan Prasarana BLK
- Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial
 1. Penguatan Kelembagaan Hubungan Industrial
 2. Pembinaan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan

- Program Ketrasmigrasian
 1. Sosialisasi dan Fasilitasi Ketrasmigrasian.

- Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.
 1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.
 2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.
 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.
 5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

4.2. Pendanaan OPD

Pagu indikatif OPD Tahun 2019 : Rp 7.176.034.000,-

- Belanja OPD :

a. Rencana belanja tidak langsung : Rp 3.213.385.000,-

b. Rencana belanja langsung : Rp 3.962.649.000,-

4.3. Matrik Renja OPD Tahun 2019 (RKT Tahun 2019)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dapat dilihat dalam Matrik berikut ini.

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
B E L A N J A					7.176.034.000	-	-	-	7.176.034.000
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3.213.385.000				3.213.385.000
II.	BELANJA LANGSUNG				3.962.649.000	-	-	-	3.962.649.000
A.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat daerah				839.749.000				839.749.000

1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Jumlah kebutuhan kegiatan administrasi perkantoran yang dapat dilayani	Kab. Pbg.	Terlayannya administrasi perkantoran selama 12 bulan, 32 PNS, honorarium pengelolaan keuangan PNS, honor tenaga harian lepas, listrik (naik dari tahun sebelumnya), air, internet, telepon, makan minum rapat, jamuan tamu, bendera umbul-umbul , penggandaan, peralatan kebersihan, alat listrik, perlengkapan rumah tangga dll	367.479.000	DAU		Terlayannya administrasi perkantoran selama 12 bulan, 32 PNS, honorarium pengelolaan keuangan PNS, honor tenaga harian lepas, listrik (naik dari tahun sebelumnya), air, internet, telepon, makan minum rapat, jamuan tamu, bendera umbul-umbul , penggandaan, peralatan kebersihan, alat listrik, perlengkapan rumah tangga dll	367.479.000
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah pegawai yg ada dapat dibiayai melalui kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Pbg.	Rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan oleh 40 karyawan	104.000.000	DAU		Rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan oleh 40 karyawan	104.000.000
3	Pemeliharaan Sarpras Kantor	Jumlah Sarpras yang terpelihara selama 12 bulan	Kab. Pbg.	Terpeliharanya sarpras selama 12 bulan, servis, suku cadang, BBM, STNK, Bea Balik Nama, Pemeliharaan gedung, jaringan telepon, komputer	219.639.000	DAU		Terpeliharanya sarpras selama 12 bulan, servis, suku cadang, BBM, STNK, Bea Balik Nama, Pemeliharaan gedung, jaringan telepon, komputer	219.639.000

4	Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan dapat memenuhi kebutuhan kantor	Kab. Pbg.	Mebelair (meja kerja, meja rapat, kursi rapat, kursi pelatihan/kuliah , papan nama antar ruang, AC , Laptop Komp PC (6), printer, CCTV (8 titik), Almari Arsip (2), Gordyn, Papan Pengumuman Lowongan Kerja, Kelengkapan Rumah Tangga, kursi tunggu pelayanan dan jaringan telapon, Kipas angin blower, penghancur kertas, tangga besi	126.631.000	DAU		Mebelair (meja kerja, meja rapat (51), kursi rapat, kursi pelatihan/kuliah , papan nama antar ruang, AC , Laptop Komp PC (6), printer, CCTV (8 titik), Almari Arsip (2), Gordyn, Papan Pengumuman Lowongan Kerja, Kelengkapan Rumah Tangga, kursi tunggu pelayanan dan jaringan telapon, Kipas angin blower	126.631.000
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai secara bertahap akan di diklat	Kab. Pbg.	Diklat sampai menunjang kemampuan tugas sebagai PNS sebanyak 15 PNS	12.000.000	DAU		Diklat sampai menunjang kemampuan tugas sebagai PNS sebanyak 15 PNS	12.000.000
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah pelaporan disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan	Kab. Pbg.	Pemenuhan laporan dapat dilaksanakan sebagai bukti kerja	10.000.000	DAU		Pemenuhan laporan dapat dilaksanakan sebagai bukti kerja	10.000.000

B.	Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja				2.677.900.000				2.677.900.000
1	Pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih	Kab. Pbg.	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan BLK : Pelatihan : 1. Otomotif 2. Las/Welder 3. Menjahit 4. Tata Boga 5. Teknik Informatika Komputer 6. Tehnik pendingin 7. tata rias pengantin 8. MTU PPHP	133.000.000	DAU		Jumlah pelatihan yang dilaksanakan BLK : Pelatihan : 1. Otomotif 2. Las/Welder 3. Menjahit 4. Tata Boga 5. Teknik Informatika Komputer 6. Tehnik pendingin 7. tata rias pengantin	133.000.000 -
2	Fasilitasi penempatan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan		-25 BKK -200 orang	145 000 000			25 BKK -200 orang	145 000 000
3	Fasilitasi Kelembagaan Pelatihan kerja swasta	Jumlah LPKS yang difasilitasi		Jumlah LPKS yang difasilitasi : 12	31.000.000			Jumlah LPKS yang difasilitasi : 12	31.000.000
4	Pelatihan produktivitas tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilatih		Pelatihan AMT, Bintek Pengukuran produktivitas tenaga kerja, pra seleksi pemagangan jepang	193.900.000			Pelatihan AMT, Bintek Pengukuran produktivitas tenaga kerja, pra seleksi pemagangan jepang	193.900.000
5	Pengelolaan dan pemeliharaan BLK	Terpeliharanya BLK	Kab. Pbg.	4 unit gdg, 12bln	371.000.000	DAU		4 unit gdg, 12bln	371.000.000

	6	Penyediaan Sarana dan Prasarana BLK	Tersedianya Sarpras BLK	BLK	a. Kebutuhan kejuruan Las : 1. Ruang Instruktur 2. Lemari file 3. meja instruktur 4. LCD proyektor 5. Wall screen b. Kebutuhan kejuruan Teknik Pendingin : 1. Papan simulator 2. Lemari file 3. Rak Alat 4. LCD Proyektor 5. Wall Screen 6. Pengembangan gedung BLK	1.567.000.000			Kebutuhan kejuruan	1.567.000.000
C.	Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial					245.000.000	-		-	245.000.000
	1	Penguatan kelembagaan hubungan industrial	Jumlah pembinaan kelembagaan HI		Pembinaan Kelembagaan HI 60 perusahaan, Pembinaan Serikat Pekerja 50 org, Pembinaan APINDO 50 org, Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan 100 prush. 1. Senam Bersama 2. Lomba Karaoke 3. Lomba Memasak 4. Pertand. Sepak Bola perempuan	140.000.000			Pembinaan Kelembagaan HI 60 perusahaan, Pembinaan Serikat Pekerja 50 org, Pembinaan APINDO 50 org, Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan 100 prush. 1. Senam Bersama 2. Lomba Karaoke	140.000.000

					5. Pertand. Badminton 6. Sarasehan tenaga kerja dan pengusaha 7. Resepsi dengan peserta 1000 orang				3. Lomba Memasak 4. Pertand. Sepak Bola perempuan 5. Pertand. Badminton 6. Sarasehan tenaga kerja dan pengusaha 7. Resepsi dengan peserta 1000 orang	
	2	Pembinaan Pengupahan dan kesejahteraan pekerja di perusahaan	Jumlah perusahaan yang emndapat pembinaan.	Kab. Pbg.	Survey 3 pasar besar, sosialisasi UMK dan Struktur Skala minimum , pemantauan UMK da THR di 60 perusahaan	105.000.000	DAU		Survey 3 pasar besar, sosialisasi UMK dan Struktur Skala minimum , pemantauan UMK da THR di 60 perusahaan	105.000.000
D.	Program Ketransmigrasian	Persentase calon transmigran yang difasiitasi				200.000.000				200.000.000
	1	Sosialisasi dan Fasilitasi Ketransmigrasian	Jumlah masyarakat yang terfasilitasi transmigrasi	Kab. Pbg.	Sosialisasi ketransmigrasian 20 desa, Rekrutmen, seleksi dan pelatihan calon transmigran, Cek Lokasi transmigrasi, Pengadaan Perbekalan serta Pendampingan penempatan bagi calon transmigran	200.000.000	DAU		Sosialisasi ketransmigrasian 20 desa, Rekrutmen, seleksi dan pelatihan calon transmigran, Cek Lokasi transmigrasi, Pengadaan Perbekalan serta Pendampingan penempatan bagi calon	200.000.000

BAB V
PENUTUP.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bagian dari awal proses fungsi manajemen. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan akan tergantung pula pada proses fungsi manajemen lainnya, yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan. Namun demikian paling tidak penyusunan rencana yang baik akan sangat membantu kelancaran dan keberhasilan suatu kegiatan. Dalam kerangka itulah rencana kerja ini disusun secara bertahap agar dapat membantu terwujudnya visi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga , Juni 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGGA



Ir. GUMARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590811 198503 1 016

9/16

